



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6562

PENDIDIKAN. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
Universitas Sebelas Maret. (Penjelasan atas Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2020
TENTANG
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

I. UMUM

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar pemerintah pusat memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Dalam konteks ini telah disusun suatu Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Salah satu subsistem pendidikan nasional yaitu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Sebagai bagian dari subsistem pendidikan tinggi, universitas harus mampu menjalankan peran strategis dalam menghasilkan sumber daya intelektual, ilmuwan/profesional yang inovatif, kreatif, responsif, terampil, berkarakter, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Selain itu, universitas harus memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Peran ini dapat dicapai jika universitas sebagai pusat pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi secara terus-menerus melakukan perbaikan dan pengembangan yang berkelanjutan.

Sehubungan dengan itu maka peran dan dinamika Universitas

Sebelas Maret memiliki relevansi yang erat dan penting. Universitas Sebelas Maret berupaya melakukan penataan yang terus-menerus (*continuous improvement*) untuk menyesuaikan antara arsitektur kelembagaan dan aktivitas akademik/nonakademik yang harus dilakukan.

Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian "Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret". Dalam perkembangannya pada Tahun 1982 nama Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret, yang disingkat UNS Sebelas Maret, ditetapkan menjadi Universitas Negeri Sebelas Maret, yang disingkat UNS.

Perubahan nama dan singkatan ini diresmikan dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1982. Saat itu UNS memiliki 8 (delapan) Fakultas, yakni Fakultas Sastra Budaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Teknik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0297/0/1996 tanggal 1 Oktober 1996, UNS menambah 1 (satu) fakultas yaitu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, termasuk berbagai Program Studi pascasarjana, yaitu strata 2 dan strata 3, serta penataan organisasi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. Pada tahun 2018 berdiri Fakultas Keolahragaan, sehingga sampai saat ini UNS memiliki 10 (sepuluh) fakultas, program pascasarjana, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan fleksibilitas pengelolaan lembaga, khususnya pengelolaan aset dan keuangan, UNS memantapkan diri menjadi badan layanan umum. Status pengelolaan lembaga sebagai badan layanan umum ditetapkan pada tahun 2009 dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009. Berdasarkan keputusan tersebut, UNS telah memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan manajemennya. Hasil yang didapat yaitu pada Tahun 2015 UNS telah menjadi perguruan tinggi yang terkemuka dengan akreditasi institusi A, kategori klaster I perguruan tinggi Indonesia versi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019 dan memperoleh peringkat 7 nasional versi *webometrics*.

Saat ini UNS telah merencanakan atau menargetkan untuk menjadi perguruan tinggi negeri kelas dunia pada tahun 2030-an. Rencana tersebut telah ditetapkan dalam perencanaan jangka panjang pengembangan UNS menjadi *World Class University* Tahun 2031. Belajar dari pengalaman mengelola fleksibilitas badan layanan umum yang dapat mendorong peningkatan kinerja, maka untuk mencapai *World Class University*

diperlukan pengembangan organisasi UNS menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum sehingga lebih memiliki otonomi dalam pengelolaan. Dengan otonomi tersebut maka dapat meningkatkan tanggung jawab seluruh Sivitas Akademika untuk meningkatkan kinerja menuju *World Class University*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud “budaya kerja” adalah nilai yang perlu dimiliki setiap Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan dalam bekerja untuk kemajuan UNS.

Singkatan budaya kerja UNS yaitu ACTIVE, yang maknanya terdiri dari orientasi pada kinerja (*achievement orientation*), mengutamakan pelanggan (*customer orientation*), kerja tim (*team work*), integritas (*integrity*), berwawasan kedepan (*visionary*), dan kewirausahaan (*entrepreneurship*).

Pasal 9

UNS berkedudukan di Kota Surakarta dan mempunyai beberapa kampus antara lain di Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur.

Pasal 10

Hari jadi UNS atau dies natalis UNS ditentukan tanggal 11 Maret berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian "Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret".

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "Standar Nasional Pendidikan Tinggi" adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

Yang dimaksud dengan "Standar Nasional Pendidikan" adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan "Standar Penelitian" adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Yang dimaksud dengan "Standar Pengabdian kepada Masyarakat" adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan" adalah pengakuan yang diberikan oleh UNS kepada para pihak yang telah menunjukkan jasa dan baktinya yang luar biasa dalam pengembangan nilai akademik, sosial, ekonomi, intelektual, budaya, nasionalisme, kepeloporan, kepemimpinan, dan telah memberikan makna positif bagi UNS dalam melaksanakan misi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan kehidupan masyarakat dan kemanusiaan secara luas.

Yang dimaksud dengan "para pihak yang telah menunjukkan jasa dan baktinya" yaitu perorangan, kelompok, institusi, dan/atau lembaga, yang berasal dari dalam dan luar UNS, warga negara Indonesia atau warga negara asing, yang masih hidup atau yang telah wafat.

Gelar doktor kehormatan dapat berupa Doktor Honoris Causa atau gelar/bentuk lain yang dipandang tepat oleh UNS.

Sedangkan penghargaan antara lain berupa surat keputusan, piagam, plakat, medali, lencana, prasasti pengabdian, dan bentuk penghargaan lain yang dipandang tepat oleh Rektor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.